



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

LPPD

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH**

2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 27 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, yang tata cara dan substansi materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi mengenai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 dan pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance).

Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua pihak atas segala dukungan dan kerjasamanya yang terbina selama ini sehingga penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Benteng, 30 Januari 2023
KEPALA DINAS

ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670526 199703 1 005





DAFTAR ISI

SAMPUL (HALAMAN JUDUL)	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum OPD	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural	5
BAB. II CAPAIAN KINERJA A PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output (Permendagri 18 Tahun 2020)	8
2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome (Permendagri 18 Tahun 2020).....	18
2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Permendagri 18 Tahun 2020)	22
BAB. III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
3.1. Dasar Hukum	47
3.2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan	47
3.3. Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan	52
BAB. IV PENUTUP	54
LAMPIRAN	55





BAB I

PENDAHULUAN

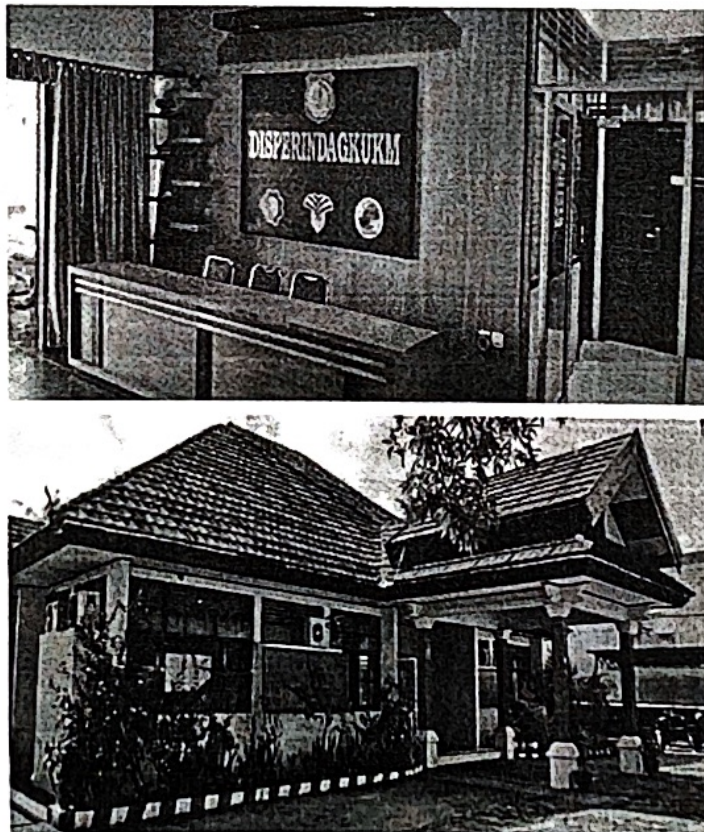
1.1. Gambaran Umum OPD

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 Km². Terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 Km². Dan luas wilayah laut 9.146,66 Km². Dengan panjang garis pantai yaitu 670 Km.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak pada garis lintang -6,117331 dan garis bujur 120,462907 yang berlokasi di Jl. K.H. Dewantara No. 18, Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Telepon (0414) 21028, FAX. 21732, Email : perindagkabselayar@gmail.com

Gambaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1.





Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan, salah satu perubahan dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta perubahan nomenklatur.

Pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum pada lampiran Undang-undang 9 Tahun 2015 tersebut, sehingga diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan 2 (Dua) urusan pemerintahan di 3 (Tiga) kementerian yakni urusan wajib, bidang urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan urusan pilihan, bidang urusan perindustrian dan bidang urusan perdagangan.

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan, salah satu perubahan dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta perubahan nomenklatur.

Pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum pada lampiran Undang-undang 9 Tahun 2015 tersebut, sehingga diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian,





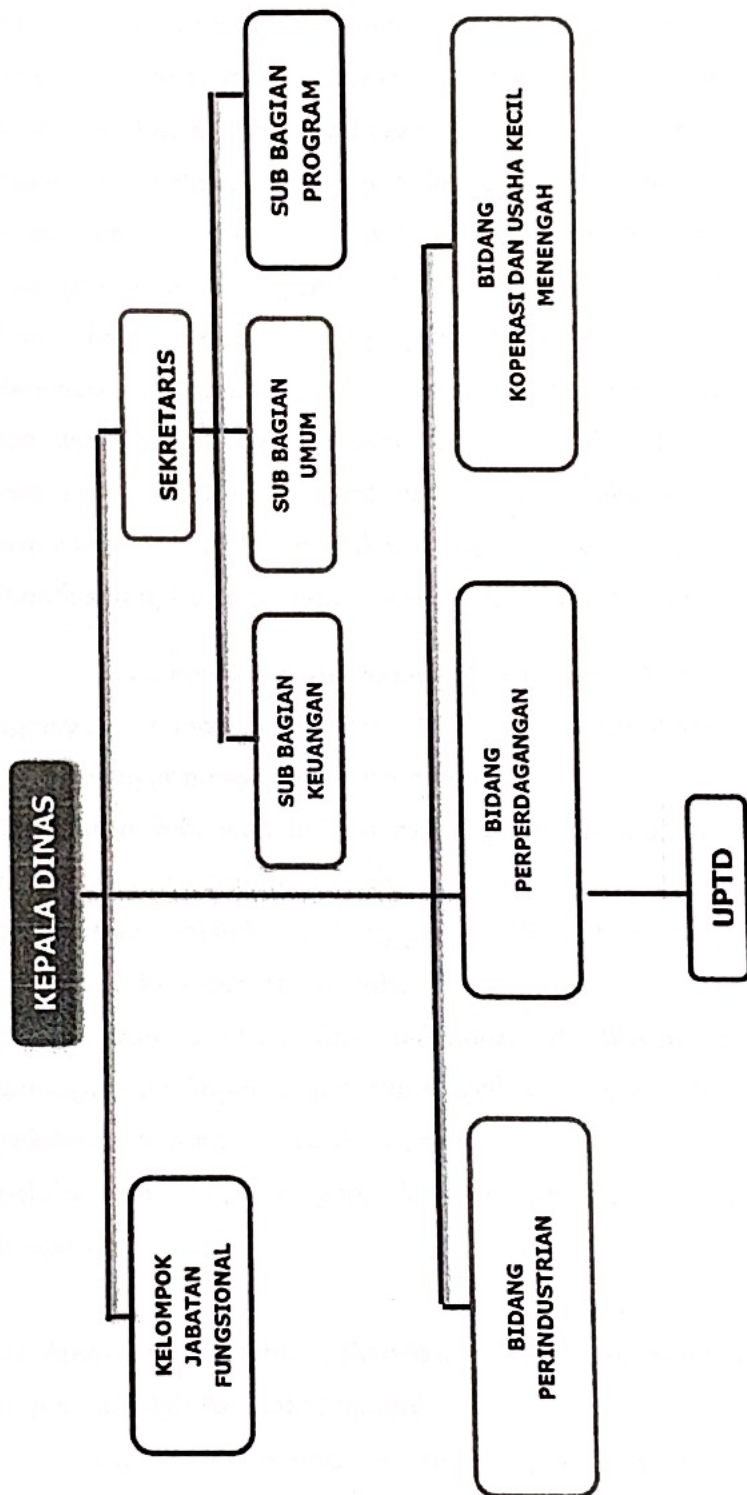
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Perindustrian,
- d. Bidang Perdagangan,
- e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas



Gambar 1.2.
STRUKTUR ORGANISASI





Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati Kepulauan Selayar dalam merumuskan, pembinaan dan pengendalian kebijakan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 94 (Sembilan Puluh Empat) orang Pegawai, terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil, 61 (Enam puluh satu) orang Pegawai Harian Lepas, Untuk lebih jelas ada pada data terlampir :





4 Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	Pendidikan	PNS	PHL	Jumlah
1	S2	7 Org	-	7 Org
2	S1	17 Org	26 Org	43 Org
3	D.III	2 Org	2 Org	4 Org
4	D.II	-	4 Org	4 Org
5	SMA	7 Org	28 Org	35 Org
6	SMP	-	1 Org	1 Org
	Total	33 Org	61 Org	94 Org

4 Data Pegawai Berdasarkan Pangkat

No	Pangkat	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	2 Org
2	Pembina Tk. I	1 Org
3	Pembina	2 Org
4	Penata Tk. I	7 Org
5	Penata	Org
6	Penata Muda Tk. I	4 Org
7	Penata Muda	3 Org
8	Pengatur Tk. I	4 Org
10	Pengatur Muda Tk. I	2 Org
	Total	36 Org

4 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

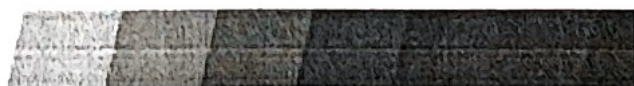
No	Dinas/Bidang/Seksi	Golongan			Jumlah
		IV	III	II	
1	Kepala Dinas	1 Org	-	-	1 Org
2	Sekretariat	1 Org	7 Org	2 Org	10 Org
3	Perindustrian	1 Org	4 Org	1 Org	6 Org
4	Perdagangan	1 Org	7 Org	1 Org	9 Org
5	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Org	6 Org	-	7 Org
	Total	5 Org	24 Org	4 Org	33 Org





✚ Jumlah Pejabat Struktural

No	Dinas/Bidang/Seksi	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Org
2	Sekretaris	1 Org
3	Kepala Bidang	3 Org
4	Kepala Sub Bagian	3 Org
	Total	8 Org



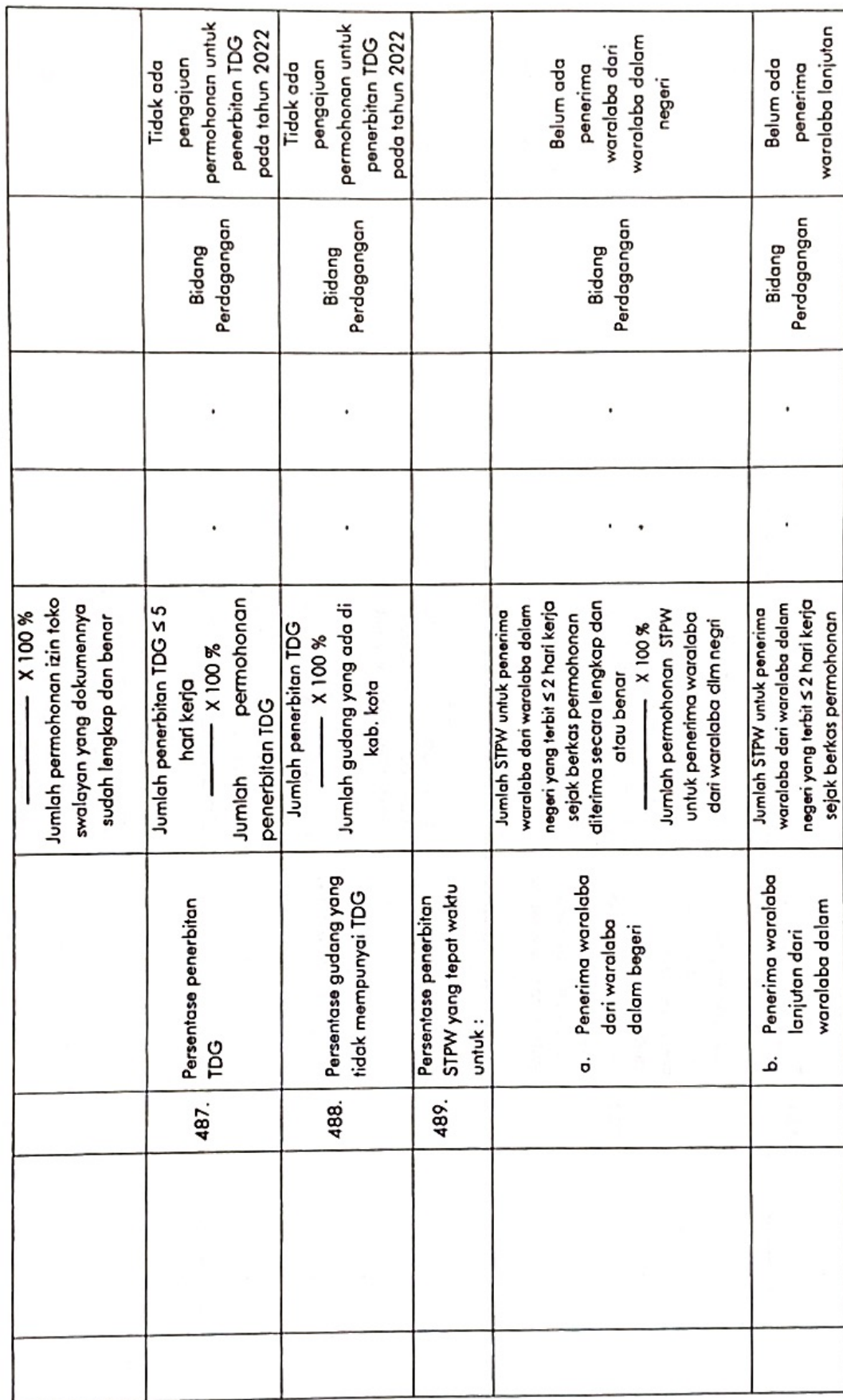


BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output (Permendagri 18 Tahun 2020)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Keterangan
1.	Bidang Perdagangan	484. Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :					
		a. Pusat Perbelanjaan	Jumlah izin pusat perbelanjaan Yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja $\frac{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan}} \times 100 \%$	$\frac{69}{69} \times 100$	100	Bidang Perdagangan	Ada Bukti Pendukung
		b. Toko Swalayan	Jumlah izin toko swalayan yang di terbitkan ≤ 5 hari kerja	$\frac{9}{9} \times 100$	100	Bidang Perdagangan	Ada Bukti Pendukung





		negeri	diterima secara lengkap dan atau benar _____ X 100 % Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dim negeri				dari waralaba dalam negeri
		c. Penerima waralaba lanjutan	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar _____ X 100 % Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dluar negeri	.	.	Bidang Perdagangan	Belum ada penerima waralaba lanjutan
	490.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab./Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kab kota _____ X 100 % Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	.	.	Bidang Perdagangan	Belum ada fasilitas pembiayaan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kab/kota
	491.	Persentase penerbitan SKPA yang tepat waktu		.	.	Bidang Perdagangan	Belum ada permohonan untuk



								perbitan SKA
						</		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Bidang Perindustrian	500. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan $\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100$	$\frac{1}{1} \times 100$	100	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung
		501. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK tahapan : a. Tersusunnya naskah akademik (30%) b. Tersusunnya draf raperda RPIK (20%) c. Draft raperda RPIK yang disetujui DPRD d. Persetujuan DRAF Raperda RPIK oleh gubernur provinsi (15%) e. Penetapan Perda RPIK (10%)		100	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung
		502. Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (UI) kecil dan IUI menengah yang	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan $\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau}} \times 100 \%$	$\frac{178}{178} \times 100$	100	PTSP	Ada Bukti Pendukung



	diterbitkan	pengajuan izin yang masuk					
	503.	Persentase jumlah izin perluasan Industri (IPI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan — X 100 % Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	-	-	Bidang Perindustrian	Belum ada permohonan pengajuan untuk penerbitan IPI
	504.	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	.	$\frac{1}{1275} \times 100$	0,07	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	-	-	Bidang Koperasi dan UKM	Koperasi yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya



							sebagai persyaratan pengurusan IUSP
		koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah usaha simpanpinjam koperasi yang belummempunyai izin usahasimpan pinjam}}{\text{Jumlah koperasi yang belummempunyai izin usahasimpan pinjam}} \times 100 \%$				
	373.	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam $\frac{\text{Jumlah permohonan ataupengajuan yang masuk}}{\text{Jumlah permohonan ataupengajuan yang masuk}} \times 100 \%$			Bidang Koperasi dan UKM	Koperasi yang berdomisili di daerah belum memungkinkan untuk membuka kantor cabang. (belum memenuhi syarat)
	374.	Persentase Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa $\frac{\text{Jumlah Koperasi yang ada}}{100 \%} \times 100 \%$	6,58		Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
	375.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh kopeasi yang dinilai kesehatannya . $\frac{\text{Jumlah usaha simpanpinjam oleh koperasi yangada}}{\text{Jumlah usaha simpanpinjam oleh koperasi yangada}} \times 100\%$	14,97		Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
	376.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	Jumlah koperasi yang	13,17		Bidang Koperasi dan	Ada Bukti Pendukung



		untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	mengikuti pendidikan dan pelatihan _____ x 100% Jumlah koperasi yang ada		UKM	
	377.	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / Kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian _____ x 100 % Jumlah Koperasi yang ada	$\frac{85}{167} \times 100$	50,89	Bidang Koperasi dan UKM Ada Bukti Pendukung
	378.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				Bidang Koperasi dan UKM Belum ada koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
	379.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan				Tidak perlu diisi
	380.	Persentase fasilitas pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi	Jumlah Koperasi yang diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	$\frac{8}{167} \times 100$	4,79	Bidang Koperasi dan UKM Ada Bukti Pendukung



		(NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	_____ X 100% Jumlah koperasi yang ada				
	381.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan _____ X 100 % Jumlah koperasi yang ada	-	Bidang Koperasi dan UKM	Tidak ada lembaga keuangan yang menawarkan kerjasama kemitraan dalam bentuk bantuan pinjaman pembiayaan.	
	382.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan pemasaran _____ X 100 % Jumlah koperasi yang ada	-	Bidang Koperasi dan UKM	Karena hampir sebagian besar koperasi yang ada bergerak di unit pertokoan dan usaha simpan pinjam	
	383.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan _____ x 100 % Jumlah koperasi yang ada	$\frac{15}{167} \times 100$	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung	



		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan _____ X 100 % Jumlah koperasi yang ada		Bidang Koperasi dan UKM	Persyaratan untuk menjalin kerjasama kemitraan sulit dipenuhi oleh koperasi yang ada
384.						
385.		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru _____ X 100 % Jumlah wirausaha yang ada	$\frac{261}{2519} \times 100$	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
386.		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system Online Data System (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam Sistem Data Online (ODS) _____ x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	$\frac{4.870}{19.625} \times 100$	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
387.		Persentase jumlah usaha mikro yang ada	Jumlah usaha mikro yang bermitra _____ X 100 % Jumlah usaha mikro yg ada	$\frac{25}{19.625} \times 100$	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
388.		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas _____ x 100 % Jumlah Usaha Mikro yang ada	$\frac{315}{19.625} \times 100$	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
389.		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran _____ x 100%	$\frac{80}{36} \times 100$	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung



	pemasaran	Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran				
390.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	0,68	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung	
391.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan pendampingan}}{\text{Jumlah usaha mikro yg ada}} \times 100\%$	3,07	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung	

2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil / Outcome (Permendagri 18 Tahun 2020)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Bidang Perdagangan	97. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di}} \times 100\%$	$\frac{1232}{1232} \times 100$	100	Bidang Perdagangan	Ada Bukti Pendukung



		swalayan)	wilayah kabupaten / kota			
	99.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera SAH yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan $\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera ulang di wilayah kabupaten kota (2022)}} \times 100 \%$			Adanya kesalahan penyeteraan jabatan ke jabatan fungsional penara sehingga pelayanan tera dan tera ulang tidak dapat terlaksana

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Keterangan
1.	Bidang Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	(Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) - (Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-2) $\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1} - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-2}}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}} \times 100 \%$	$\frac{1300 - 1275}{1275} \times 100$	1,96	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk	Jumlah kegiatan yang terlaksana		66,66	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung



		turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPJP	Jumlah Rencana Kegiatan x 100%				
	102.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan _____ x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{116}{116} \times 100$	100	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung
	103.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPU) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan _____ x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan	-	-	-	Belum ada permohonan penerbitan IPU yang diajukan sehingga tidak ada pemantauan dan pengawasan



		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan _____ x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan	-	-	-	Belum pernah ada diterbitkan IUKI & IPKI
	104.						
	105.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan	-	100	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung
			Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan	-	100	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung
			Informasi produksi dan kapasitas produksi	43.598.712.170	100	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung
			Informasi bahan baku dan bahan penolong	23.513.245.730	100	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung
			Informasi bahan bakar / energy	-	-	-	Tidak pernah dilakukan pendataan terkait bahan bakar / energy
			Informasi tenaga kerja	2.061	100	Bidang Perindustrian	Ada Bukti Pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	74. Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, $\frac{\text{Volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	$\frac{28}{167} \times 100$	16,66	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung
		75. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha $\frac{\text{Jumlah usaha mikro}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{4870}{19.625} \times 100$	24,81	Bidang Koperasi dan UKM	Ada Bukti Pendukung

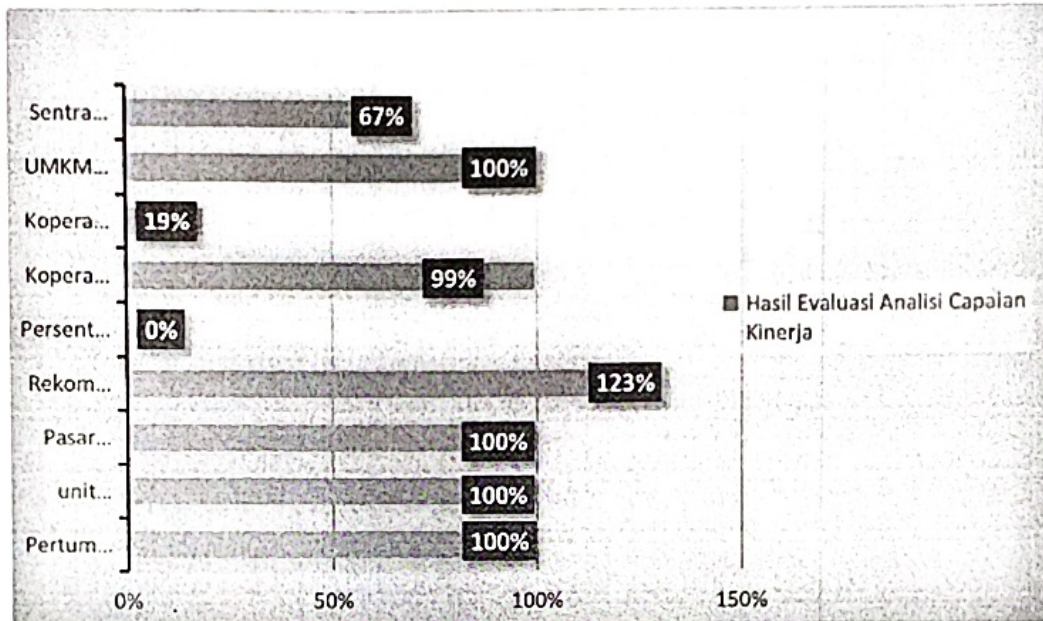
2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan (Permendagri 18 Tahun 2020)

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja N	Sumber Data
1.	Urusan Perindustrian	1. Pertumbuhan Sektor Industri	100	
		2. Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah	100	
2.	Urusan Perdagangan	1. Pasar rakyat dalam kondisi baik	100	



3.		2. Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	123,3	
		3. Persentasi UTTP yang bertanda tera SAH	0	
	Urusan Koperasi dan UKM	1. Persentase Koperasi Aktif	99,27	
		2. Persentase Koperasi Sehat	18,66	
		3. Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif	100	
		4. Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang Dikembangkan	66,66	

Tabel 2.3.1
Hasil terhadap analisis capaian kinerja



Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

1. Target dan Realisasi Kinerja

Dari Indikator-Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan rata-rata capaian realisasi di rinci pada tabel berikut :

NO	Indikator Kinerja Utama	Target Th. 2022	Realisasi Th. 2022	% Capaian Th. 2022
I.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian			
	a. Pertumbuhan Sektor Industri	25 IKM	25 IKM	100
	b. Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah	51 IKM	51 IKM	100





II.	Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan dan Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrollogian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar			
	a. Pasar rakyat dalam kondisi baik	85	85	100
	b. Jumlah rekomnedasi izin usaha yang diterbitkan	1000	1232	123,2
	c. Persentasi UTP yang bertanda tera SAH	600 UTP	0 UTP	0
III.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing, Kemandirian Koperasi serta Kualitas UMKM			
	a. Persentase Koperasi Aktif	138	137	99,27
	b. Persentase Koperasi Sehat	150	28	18,66
	c. Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif	350 UKM	350 UKM	100
	d. Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang Dikembangkan	45 UKM	30	66,66

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu, dapat dilihat berdasarkan IKU Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.2

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

NO	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		% Capaian Kinerja	Tahun 2022		% Capaian Kinerja
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
I.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian						
	a. Pertumbuhan Sektor Industri	50 IKM	48 IKM	96	25 IKM	25 IKM	100
	b. Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah	32 IKM	32 IKM	100	51 IKM	51 IKM	100





II.	Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan dan Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrolagian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar						
a.	Pasar rakyat dalam kondisi baik	80%	60%	75	85%	85	100
b.	Jumlah rekomnedasi izin usaha yang diterbitkan	80	76	95	1500	1232	123,2
c.	Persentasi UTP yang bertanda tera SAH	600 UTP	257 UTP	43	600 UTP	0	0
III.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing, Kemandirian Koperasi serta Kualitas UMKM						
a.	Persentase Koperasi Aktif	138	136	98	138	137	99,27
b.	Persentase Koperasi Sehat	150	89	59	150	24	16
c.	Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif	350 UKM	346 UKM	98	350 UKM	350 UKM	100
d.	Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang Dikembangkan	45 UKM	31 UKM	69	45 UKM	30 UKM	66,66

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian indikator tersebut melalui 9 indikator sampai tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

3.1. Pertumbuhan Sektor Industri

Pertumbuhan industri didukung oleh Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan :

- I. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan output pelaksanaan Coaching dan Workshop IPRO (Investment Project Ready to



Offer) kawasan distribusi logistik – KTI dan kawasan industri kerjasama Kementerian Investasi / BKPM.



2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dengan output Pembentukan 5 (lima) sentra yaitu sentra pengolahan pisang di pasilambena, sentra pembuatan kapal rakyat di pasimarannu, sentra pengolahan ikan kering di taka bonerate, sentra pengolahan jambu mente di kecamatan pasimasunggu dan pasimasunggu timur. Selain itu pelaksanaan Penyusunan Master Plan (Rencana Induk) dan Fisibility Study (Study Kelayakan) pembangunan KIS (Kawasan Industri Selayar) serta KIPT (Kawasan Industri Perikanan Terpadu) kerjasama dengan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dan LPPM Universitas Bosowa.





3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, pembentukan 3 sentra di 3 kecamatan. Yaitu Sentra Pengolahan Ikan di Pasilambena, Sentra Kapal Rakyat di Pasimarannu dan Sentra Olahan Ikan di Taka Bonerate.
4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, output study lokasi pembangunan KIS (Kawasan Industri Selayar) serta KIPT (Kawasan Industri Perikanan Terpadu).





5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, output pelaksanaan pelatihan pengolahan ikan, pengolahan kelapa dan pengolahan jambu mente. Sebanyak 18 angkatan dengan jumlah peserta 1080 pelaku ukm dari 11 kecamatan kabupaten kepulauan selayar.
6. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri, output pelaksanaan pameran industri kreatif, dekranasda dan pekan raya sulsel.
7. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan KIS (Kawasan Industri Selayar) serta KIPT (Kawasan Industri Perikanan Terpadu), output pelaksanaan workshop penyusunan rencana pembangunan multi moda transportation dan mekanisme pembebasan lahan untuk kawasan.

3.2. Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah

Peningkatan unit usaha industri unggulan daerah didukung oleh Program Pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota, dengan kegiatan :

Koordinasi dan sinkronisasi pengwasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten/kota output pembangunan sentra pengolahan ikan di kecamatan bontoharu dengan anggaran sebesar Rp. 6.409.581.125 dan capaian sebesar 100 %.

3.3. Pasar Dalam Kondisi Baik

Pasar rakyat dalam kondisi baik didukung dengan Program Sarana Distribusi Perdagangan dengan kegiatan :

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan output fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, peningkatan distribusi barang/jasa dan memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku usaha dan pihak buyer.



Penyerahan hibah Pasar Rakyat Pasimarannu dan Pasar Rakyat Pasimasunggu Timur sekaligus pemberian penghargaan atas partisipasi pembangunan pasar oleh pihak Kementerian Dalam Negeri



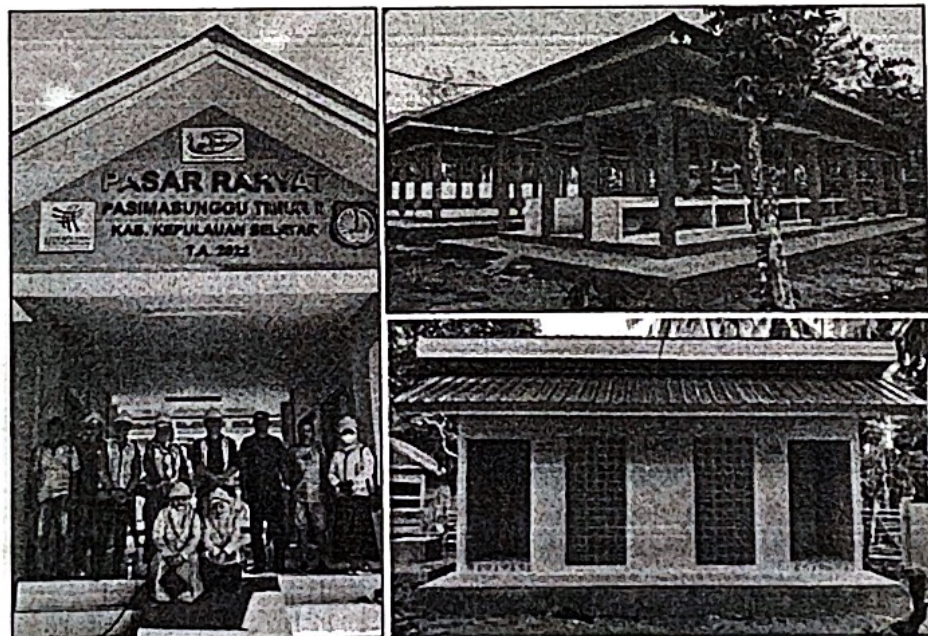
Dana APBN untuk tahun 2018-2022, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah telah mendapatkan Tugas Pembantuan Pasar Rakyat sebanyak 10 (Sepuluh) pasar di 9 kecamatan yakni Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Benteng, Kecamatan Taka Bonerate, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontomanain, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur, tahun 2022 diamanahkan 2 dana Tugas Pembantuan di 2 (dua) kecamatan, yakni :

- ✓ Pasar Rakyat Pasimarannu di Kecamatan Pasimarannu dengan anggaran sebesar Rp. 2.801.100.000,-





- ✓ Pasar Rakyat Pasimasunggu Timur di Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan anggaran sebesar Rp. 2.800.910.000,-



Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kecamatan daratan dan kepulauan dengan output sosialisasi pada 70 orang pelaku usaha.



3.4. Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Yang Diterbitkan

Rekomendasi izin usaha yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, output terbitnya 1232 Rekomendasi dari 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.



3.5. Persentase UTP Bertanda Tera SAH

Persentase Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTP) yang bertanda tera sah didukung oleh program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, output Total jumlah alat yang diawasi pada tahun 2022 sebanyak 379 alat UTP. Sedangkan persentase alat UTP yang bertanda tera SAH tidak ada dikarenakan tidak adanya tenaga penera akibat kesalahan penyetaraan jabatan fungsional penera.





Tabel 3.2.3
Daftar Rincian Alat UTTP yang diawasi

No	Jenis UTTP	Tahun Anggaran			
		2018	2019	2020	2021
1	Takaran Kering	179	199	90	126
2	Timb. Pegas	135	179	98	162
3	Timb. Centicimal	21	14	12	13
4	Meter Kayu	3	6	2	1
5	Timb. Elektronik	7	9	8	13
6	Dacin Logam	15	17	9	17
7	Anak Timbangan	81	15	25	31
8	Neraca Emas	10	9	3	1
9	Timb. Bobot Insut		1	1	1
10	SPBU	17	8	15	10
11	Timb. Meja	1	3	1	-
12	Timb. Pegas Cepat	-	-	1	1
13	AMP	-	1	1	-
14	Timb. Digital	-	-	1	-
15	Timb. Elektronik Emas	-	-	1	3
Jumlah Alat		469	461	268	379
Jumlah Retribusi			Rp 10.404.000	Rp 7.747.000	Rp 3.941.000

3.6. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif didukung oleh Program :

1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, output 50 Koperasi
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, output 137 koperasi aktif dari 168 jumlah koperasi dari 11 kecamatan di Kepulauan Selayar.



Tabel 3.2.4
Persentase koperasi aktif tahun 2017-2022

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koperasi aktif	145	131	162	136	136	138
2	Jumlah koperasi	189	161	132	165	165	167
3	Persentase koperasi aktif	76,72	81,37	81,48	82,42	82,42	82,63

3.7. Persentase Koperasi Sehat

Persentase koperasi sehat didukung oleh program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi dengan kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, output 2 koperasi sehat dari 138 koperasi aktif di 11 kecamatan di Kepulauan Selayar. Yang menerima penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sejak tahun 2016-2021 sebagai Koperasi Berprestasi yaitu koperasi Kontue Toje', Koperasi Sadar dan Koperasi Primer Kepolisian.

3.8. Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif

Persentase Peningkatan UMKM yang Produktif didukung oleh Program Pengembangan UMKM dengan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, output pelatihan dan sosialisasi kepada 275 peserta.



3.9. Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang dikembangkan

Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang dikembangkan didukung oleh Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) , dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, output dengan pemberian bantuan peralatan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sebanyak 132 unit dalam 45 kelompok.

Tabel 3.2.5

Rekap Daftar Nama-Nama Kelompok Penerima Bantuan

Total Keseluruhan Jumlah Penerima Bantuan dari Tahun 2017-2022 Sebanyak 500 Kelompok, dengan Jumlah Unit Sebanyak 2.813 Unit Bantuan Peralatan.

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2022 Sebesar Rp. 2.245.196.000,- terdiri dari :

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Depot Air Minum	2	2
2	Pengadaan AMDK	1	1
3	Pengadaan Masak-memasak	11	55
4	Mesin Jahit	6	35
5	Parut Kelapan	7	36
6	Ada Pertukangan	10	70
7	Perbengkelam	8	73 Unit
	Jumlah	45 Kelompok	132 Unit

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2021 Sebesar Rp. 2.245.196.000,- terdiri dari :

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Alat Depot Air Minum	2	2 unit
2	Pengadaan Mesin Mixer Pembuat Roti	3	20 Unit
3	Pengadaan Mesin jahit	3	12 Unit
4	PengadaanMesin Obras	3	9 Unit
5	Pengadaan Mesin penggiling tepung	1	1 Unit



	ikan		
6	Pengadaan Pertukangan	14	92 unit
7	Pengadaan Mesin Sentri Fugar	4	4 Unit
8	Pengadaan Mesin penggiling Mie	9	27 Unit
9	Pengadaan Mesin Pemeras kelapa	9	9 Unit
10	Pengadaan mesin gula Merah	4	4Unit
	Jumlah	52 Kelompok	180 Unit

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2017 Sebesar Rp. 1.506.772.250,- terdiri dari :

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Peralatan Masak Memasak	23 Kelompok	427 Unit
2	Pengadaan Mesin Spinner	22 Kelompok	73 Unit
3	Pengadaan Mesin Penggiling Daging	15 Kelompok	30 Unit
4	Pengadaan Mesin Pembuat Roti	22 Kelompok	20 Unit
5	Pengadaan Alat Kacip	21 Kelompok	96 Unit
	Jumlah	103 Kelompok	217 Unit

Anggaran Pengadaan Peralatan Tahun 2018 Sebesar Rp. 1.997.459.250,- terdiri dari :

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Parut Kelapa	22 Kelompok	67 Unit
2	Pengadaan Alat Pengelolaan Ikan	20 Kelompok	60 Unit
3	Pengadaan Alat Pertukangan	22 Kelompok	22 Unit
4	Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras	37 Kelompok	40 Unit
5	Pengadaan Oven Kue	20 Kelompok	20 Unit
6	Pengadaan Alat Vacum Pres	32 Kelompok	94 Unit
7	Pengadaan Alat Pemecah Kulit Kemiri	11 Kelompok	11 Unit
8	Pengadaan Mesin Pengering	12 Kelompok	12 Unit
9	Pengadaan Mesin Press Emping	16 Kelompok	16 Unit
10	Pengadaan Alat Kerajinan	17 Kelompok	272 Unit
	Jumlah	209 Kelompok	614 Unit

Anggaran Pengadaaan Peralatan Tahun 2019 Sebesar Rp.1.258.575.000,- terdiri dari ini:



No	Jenis Pengadaan	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit
1	Pengadaan Alat Perajang Keripik	15 Kelompok	105 Unit
2	Pengadaan Mesin Jahit Dan Obras	12 Kelompok	60 Unit
3	Pengadaan Mesin Pencetak Batu Merah	5 Kelompok	5 Unit
4	Pengadaan Alat Pertukangan	17 Kelompok	119 Unit
5	Pengadaan Alat Masak Memasak	25 Kelompok	550 Unit
6	Pengadaan Pengupas Sabut Kelapa	5 Kelompok	5 Unit
7	Pengadaan Mesin Parut Kelapa Dan Penepung Beras	11 Kelompok	55 Unit
8	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Dan Mesin Press Sampah	1 Kelompok	2 Unit
Jumlah		91 Kelompok	901 Unit

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Alokasi dan realisasi anggaran, rasio ekonomi, capaian kinerja keluaran dan rasio efesiensi dari masing-masing Urusan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai pada tabel dibawah ini :

NO	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Realisasi	Rasio Ekonomi %	Capaian Kinerja %
I.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Sektor Perindustrian				
a.	Pertumbuhan Sektor Industri	776.331.000	744.002.200	95,83	96
b.	Jumlah peningkatan unit usaha industri unggulan daerah	776.331.000	744.002.200	95,83	96
II.	Meningkatnya Skala Usaha Sektor Perdagangan dan Penguatan Kinerja Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kemetrolagian serta Pengawasan Barang dan Jasa Beredar				



	a. Pasar rakyat dalam kondisi baik	123.327.000	121.852.250	98,80	99
	b. Jumlah rekomnedasi izin usaha yang diterbitkan	20.405.500	17.137.500	83,98	84
	c. Persentasi UTTP yang bertanda tera SAH	123.581.500	113.565.400	91,89	92
III.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing, Kemandirian Koperasi serta Kualitas UMKM				
	a. Persentase Koperasi Aktif	163.640.000	163.640.000	100	100
	b. Persentase Koperasi Sehat	48.578.000	48.413.000	99,66	100
	c. Peningkatan UMKM yang Produktif	4.170.915.000	3.428.412.500	90,70	100
	d. Persentase Peningkatan Sentra UKM Potensial yang Dikembangkan	564.634.000	550.074.000	99,98	100

Dana yang dianggarkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk penyelenggaraan kegiatan berasal dari APBD tahun 2022, dengan total anggaran belanja sebesar Rp. 20.048.534.875,- Terealisasi sebesar Rp. 18.631.135.620,- atau 92,93% dengan sisa anggaran sebesar Rp.1.416.399.255,-.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa isu-isu strategis, antara lain:

URUSAN PERIINDUSTRIAN

Isu-isu strategis bidang urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

- I. Belum optimalnya Data lewat SIINAS karena terkendala banyaknya persyaratan tambahan data dukung yang sulit dipenuhi olehn pelaku IKM seperti NPWP, Nomor Induk Berusaha, OSS, dan lainnya.



2. Luasnya area cakupan pelaku industri meliputi 6 (enam) kecamatan di Kepulauan, sehingga sulit untuk mengakses pelaku Industri secara bersamaan.
3. Jumlah anggaran yang tersedia sangat terbatas.
4. Masih lemahnya SDM pelaku IKM di Kabupaten Kepulauan Selayar
5. Sulitnya mengakses permodalan karena keterbatasan lembaga bank dan non bank, hal ini yang menyebabkan pelaku IKM sangat sulit untuk ekspansi usaha, untuk dikeulauan lembaga keuangan bank yang ada baru 1 (satu), itupun statusnya masih kantor kas sehingga tidak bisa memutus kredit, hal ini menyebabkan semua pelaku usaha yang berdomisili di 6 (enam) kecamatan kepulauan harus datang ke ibu kota kabupaten untuk bisa mengakses kredit dilembaga keuangan. Itupun maksimal hanya Rp. 500 juta untuk pengambilan diatas Rp. 500 Juta harus diakses lewat kantor wilayah Maakassar.
6. Lemahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah dan Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, disebabkan oleh kurangnya hubungan kemitraan dalam hal pemasaran, design produk yang masih konservatif, kualitas produk belum memenuhi standar pasar, dan sisi higyenis produk yang masih perlu ditingkatkan, cita rasa yang masih perlu mendapat diperensiasi dan lainnya.
7. Untuk tahun berjalan, belum optimalnya peran strategis struktur industri dan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan karena banyaknya anggaran yang direlokasi dan diarahkan kepada penanganan dampak pandemi covid-19, khususnya menyangkut aktifitas perindustrian.

Namun Pencapaian kinerja di tahun 2021, Dinas Perindagkum Kabupaten Kepulauan Selayar telah mencanangkan program Pengembangan Kawasan Distribusi Logistik Indonesia Timur dan Kawasan Industri yang terintegrasi dengan segala sarana penunjang pelaksanaan sebuah bandar niaga di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun mekanisme dan rancangan program Pengembangan Kawasan Distribusi Logistik Indonesia Timur dan Kawasan Industri adalah :



1. Menyediakan kebijakan dan regulasi yang saling mendukung antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional,
2. Menyediakan kawasan dengan luas lahan yang cukup untuk pengembangan sebuah bandar niaga.
3. Membuat dan menetapkan regulasi pelaksana /pengelola pengembangan kawasan Distribusi Logistik.
4. Melakukan konsolidasi dan pemasaran investasi kepada pihak

Sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan kawasan industri ini yaitu :

- ✚ Penetapan tempat dan luas kawasan Distribusi Logistik.
- ✚ Konsolidasi dan Sikronisasi Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Nasional
- ✚ Sosialisasi dan permintaan kesediaan dukungan masyarakat kepada Pengembangan Kawasan Distribusi Logistik.
- ✚ Pemetaan dan Pengukuran Kawasan Distribusi Logistik.
- ✚ Penyusunan Study Kelayakan, DED dan Kajian yang berhubungan dengan pengembangan kawasan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, telah disusun jadwal kegiatan dalam rangka pengembangan kawasan sebagai penyedia infrastruktur dasar sebuah bandar niaga, seperti Kawasan konsolidasi, Sarana pelabuhan, Sarana jalan, Air Bersih, Telekomunikasi, Sentra jasa pertokoan dan Pergudangan, Sentra industri kecil, Menengah dan Besar, Sentra Perkantoran dan Kawasan penunjang pengembangan kawasan lainnya, sebagai berikut :

- ✓ Penetapan tempat dan luas kawasan Distribusi Logistik
- ✓ Konsolidasi dan Sikronisasi Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Nasional
- ✓ Sosialisasi dan permintaan kesediaan dukungan masyarakat kepada Pengembangan Kawasan Distribusi Logistik
- ✓ Pengukuran Lahan Kawasan Distribusi Logistik
- ✓ Penyusunan Study Kelayakan, DED dan Kajian yang berhubungan dengan Pengembangan Kawasan

Dalam pencapaian target disektor perindustrian terdapat beberapa kendala khususnya terkait program pengembangan kawasan distribusi logistic Indonesia timur yaitu antara lain sebagai berikut :



- ❖ Penetapan kawasan, luas lahan dan legalitas penggunaan lahan dalam kawasan
- ❖ Sinkronisasi regulasi dan Kebijakan pengembangan kawasan dari Kabupaten, Provinsi dan Nasional
- ❖ Pembangunan Infrastruktur Dasar
- ❖ Banyaknya kegiatan yang ditunda pelaksanaannya karena adanya relokasi anggaran yang diarahkan kepada penanganan covid-19, khususnya menyangkut aktifitas perindustrian
- ❖ Belum maksimalnya pendataan perkembangan IKM sehingga masih belum maksimal disajikan secara real dan akurat, disebabkan karena perlunya pengembangan kemampuan bagi para pendata dan pelaku IKM dalam bentuk pelatihan.
- ❖ Belum berfungsinya SIINAS sebagai instrumen pengumpulan data yang dapat menyajikan data secara real time dan valid.
- ❖ Sifat apatisme masyarakat yang tidak didukung oleh sosialisasi yang cukup oleh Pemerintah Daerah sehingga masyarakat menganggap program gerbang sari sebagai suatu hal yang tidak penting.
- ❖ Volume arus barang keluar masuk Kabupaten Kepulauan Selayar masih sedikit sehingga belum efektif dan efisien untuk dilakukan pengiriman barang melalui kontainer.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

1. Menyiapkan dana darurat yang memadai
2. Melakukan langkah-langkah penganggaran yang tepat
3. Melakukan pemutakhiran data perkembangan sektor industri melalui pendekatan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat menyajikan data secara real time dan valid sesuai dengan kebutuhan informasi data.
4. Melatih petugas pendataan industri yang disiapkan untuk kabupaten/kota serta memaksimalkan fungsi penyuluh industri dalam melakukan pendampingan kepada sentra-sentra yang vacuum atau berhenti untuk difasilitasi jalan keluar dari kelangsungan produksi dan usaha IKM baik dalam bentuk modal maupun peralatan.
5. Melakukan sosialisasi yang cukup oleh Pemerintah Daerah





6. Meningkatkan produksi pertanian, agro industri dan perikanan.

URUSAN PERDAGANGAN

Isu-isu strategis bidang urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya disebabkan karena sampai saat ini belum ada sarana dan prasarana transportasi yang khusus mengangkut logistik dan komoditi hasil pertanian dan perikanan
2. Belum adanya hasil komoditi asal Selayar yang berkategori ekspor yang dikirim ke Makassar ataupun ke Surabaya disebabkan belum adanya pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) barang, yang merupakan persyaratan untuk dapat memasuki wilayah negara tujuan, dan SKA juga merupakan persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh negara tujuan. SKA diterbitkan oleh Menteri Perdagangan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan SKA atas barang Ekspor di Indonesia
3. Belum optimalnya hasil pertanian dan perkebunan untuk kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran, buah-buahan, beras dan lainnya yang menyebabkan para pedagang masih memasok dari daerah lain untuk diperjual belikan di pasar.
4. Menurunnya omzet para pedagang akibat menurunnya daya beli masyarakat oleh karena adanya pandemik covid-19 sampai saat ini.
5. Belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga untuk mengatasi hal tersebut agar target pendapatan dapat tercapai adalah dengan mengidentifikasi pungutan retribusi atas capaian yang tidak memenuhi target.
6. Adanya beberapa pasar yang dibangun namun sampai saat ini belum difungsikan/dimanfaatkan oleh karena para pedagang



lebih menyukai hamparan dibanding los dan kios dalam bangunan gedung pasar yang telah dibangun.

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien. sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan SDM.
2. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya. padahal yang diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk dalam daerah yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya.
3. Volume arus barang keluar masuk Kabupaten Kepulauan Selayar masih sedikit sehingga belum efektif dan efisien untuk dilakukan pengiriman barang melalui container

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

1. Melakukan percepatan pengembangan kawasan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Melakukan pembinaan di aspek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong IKM yang kalah bersaing untuk dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, meminimalisir ketidakpastian, dan memproses pembelian harus mudah dan cepat.

URUSAN KOPERASI DAN UKM

Koperasi sebagai salah satu bentuk Ekonomi Industri yang sangat penting karena keberadaannya di dukung oleh pemerintah dan





sudah memasyarakat. Namun masalah yang dihadapi adalah kualitas manajemen koperasi yang masih di laksanakan secara tradisional sehingga kurang mampu bersaing baik dengan swasta maupun dengan usaha asing. Oleh sebab itu untuk mengatasi kelemahan tersebut tersebut perlu diadakan repositioning yang lebih menekankan pada aspek teknologi dan SDM (Brain Manajemen). Apalagi saat ini semua aktifitas lebih diarahkan kepada penanganan dampak pandemi covid-19.

Jumlah pelaku usaha mikro dan usaha kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar Bervariasi dari tahun 2016-2021 sebanyak 19.364 pelaku UMKM dari berbagai sektor. dan potensi Sumber Daya Alam yang di miliki Kabupaten Kepulauan Selayar cukup lengkap dan beragam baik pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, peternakan maupun pariwisata yang semoga dapat dikelola dan di kembangkan. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun karena keterbatasan SDM maupun teknologi cepat guna

Permasalahan strategisnya yaitu :

1. Meminjam modal usaha adalah masalah UKM yang utama. Efeknya para pengusaha tidak mampu meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.
2. Kurangnya pengalaman mereka tentang manajemen bisnis. Banyak dari mereka yang hanya fokus dalam memproduksi barang, namun tidak memikirkan cara ekspansi bisnis apalagi mereka kesulitan dalam meningkatkan bisnisnya dan usaha mereka pun hanya berjualan di tempat.
3. Kurangnya inovasi produk dalam hal meningkatkan daya saing bisnis. Para pengusaha seringkali di hadapkan pada kendala ketika melakukan inovasi produksinya.
4. Kesulitan dalam mendistribusikan produk karena selama ini kebanyakan pelaku UKM selalu kekurangan channel dalam hal





mendistribusikan produknya dan belum memanfaatkan/mengoptimalkan pemasaran online.

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat, karena kurang dikuasainya manajemen koperasi oleh pengurus maupun anggota
2. Masih banyak Koperasi yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya
3. Akses pelaku usaha Koperasi terhadap layanan perbankan relatif rendah.
4. Kondisi pandemi covid-19 yang membatasi ruang gerak pelaksanaan kegiatan karena semuanya diarahkan ke penanganan covid-19.
5. Masih rendahnya pelaksanaan ART
6. Adanya tunggakan penerima bantuan
7. Kegiatan usaha tidak berjalan
8. Belum optimalnya pengelolaan sentra produksi
9. Terbatasnya tenaga terampil

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

1. Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada Koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat
2. Mencari peluang anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN;
3. Meningkatkan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan perbankan.
4. Mengefektifkan penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan.





5. Mengoptimalkan penagihan terhadap penerima bantuan yang menunggak
6. Melakukan pendampingan untuk berjalannya kegiatan usaha koperasi
7. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola UKM secara swadaya.
8. Program penciptaan, penguatan dan fasilitasi UMKM yang produktif.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Dasar Hukum

- ✚ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- ✚ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran, Pendapatan, Belanja Negara Tahun 2021;
- ✚ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
- ✚ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- ✚ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- ✚ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
- ✚ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Non Sistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN TA. 2021
- ✚ Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 788 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Non Sistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021;

3.2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan

3.2.1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.

Instansi pemberi tugas bantuan adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

3.2.2. Sumber dan Jumlah Anggaran.





Data TP Pasar 2022

Program	:	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan	:	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan
No. DIPA	:	SP DIPA- 090.02.4.191438/2022 tanggal 10 Maret 2022
Sumber dana	:	APBN
Pagu	:	Rp 5.602.010.000,-
Realisasi	:	Rp 5.602.010.000,-
Nama CV Pihak Ketiga Pasimarannu)	:	1. CV. Bintang Nusantara (Konstruksi Pasimarannu) 2. CV. Nabila Multicom (Pengawasan Pasimarannu) 3. CV. Rahmat Abadi (Konstruksi Pasimasunggu Timur) 4. PT. Cempaniga Raya Konsultan (Pengawasan Pasimasunggu Timur)
Nama Pegawai	:	1. Andi Abdurrahman, SE., M.Si (KPA) 2. Mardiana, ST (PPK) 3. Andi Jora, S.H (PPSPM) 4. Aburaera Djamal, A.Md (Bendahara Pengeluaran.

3.2.3. SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar

3.2.4. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.

Untuk melaksanakan kegiatan pada tugas pembantuan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 5 (lima) orang pegawai, Untuk lebih jelas diuraikan pada tabel berikut :





Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Perdagangan	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	Program : Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Kec. Pasimasunggu Timur dan Kec. Pasimaranmu	Dinas PERINDAG KUKM Kab. Kep. Selayar	Rp 5.602.010.000,00	Rp 5.602.010.000,00	100	2 Unit	100	
		Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Non Sistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN TA.2021	Kegiatan : Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan Output : Sarana Perdagangan yang dibangun/direvitalisasi								



No	Jabatan/Pangkat	Pendidikan	Golongan		Jumlah
			IV	III	
1	Kuasa Pengguna Anggaran/Pembina Utama Muda	S1	1 Org	-	1 Org
2	Pejabat Pembuat Komitmen/Pembina	S1	1 Org	-	1 Org
3	Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM/Penata Tk. I	S1	-	1 Org	1 Org
4	Bendahara Pengeluaran/Penata Muda	S1	-	1 Org	1 Org
	Total		2 Org	2 Org	4 Org

3.2.4.1. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.

Dalam melaksanakan tugas pembantuan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar didukung sarana dan prasarana sebagaimana berikut :

NO.	NAMA BARANG	Jumah	Satuan	Keterangan
1	Komputer	18	Unit	Baik
2	Laptop	46	Unit	Baik
3	Notebook	8	Unit	Baik
4	Printer	18	Unit	Baik
5	Scanner	1	Unit	Baik
6	Sepeda Motor	25	Unit	Baik
7	Mesin Las Listrik	1	Unit	Baik
8	Mesin Pompa Air	3	Unit	Baik
9	Termometer	1	Unit	Baik
10	Stopwastch	1	Unit	Baik
11	Tool Set	2	Unit	Baik
12	Landasan Cap Lengkap	2	Unit	Baik
13	Tang Plombir	4	Unit	Baik
14	Bejana Ukur	4	Unit	Baik



15	Timbangan Meja Kapasitas 10 KG	6	Unit	Baik
16	Anak Timbangan Miligram	3	Unit	Baik
17	Anak Timbangan Bidur	25	Unit	Baik
18	Lemari Besi	7	Unit	Baik
19	Lemari Kayu	2	Unit	Baik
20	Rak Kayu	1	Unit	Baik
21	Filling Cabinet Besi	2	Unit	Baik
22	Lemari Kaca	5	Unit	Baik
23	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
24	Meja Kerja Kayu	37	Unit	Baik
25	Kursi Besi	2	Unit	Baik
26	Kursi Rapat	120	Unit	Baik
27	Kursi Tamu	3	Unit	Baik
28	Kursi Putar	27	Unit	Baik
29	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	Baik
30	Lemari Es	2	Unit	Baik
31	AC	20	Unit	Baik
32	TV	8	Unit	Baik
33	Loudspeaker	1	Unit	Baik
34	Soundsystem	1	Unit	Baik
35	Gordyin	3	Unit	Baik
36	Buffet Kayu	2	Unit	Baik
37	Buffet Kaca	6	Unit	Baik
38	Lemari Arsip	3	Unit	Baik
39	Proyektor	5	Unit	Baik
40	Kamera Digital	7	Unit	Baik
41	Faxmile	1	Unit	Baik
42	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lainnya	2	Unit	Baik
43	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	3	Unit	Baik
44	Meja Kerja Pejabat Lain	9	Unit	Baik



3.3. Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

1. Target Kinerja

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Pada pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan pada nomenklatur sub kegiatan pasar rakyat yang dibangun/revitalisasi. Kegiatan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat ini dilaksanakan sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 090.02.4.191438/2022 tanggal 10 Maret 2022.

2. Realisasi Kinerja

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan pada nomenklatur sub kegiatan pasar rakyat yang dibangun/revitalisasi ini didukung dana sebesar Rp. 5.602.010.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.602.010.000,- dengan capaian output 100%. Dan dapat dijelaskan bahwa pada kegiatan ada 2 (dua) pasar rakyat yang telah dibangun, yaitu :

1) Pasar Pasimarannu Kecamatan Pasimarannu

2) Pasar Pasimasunggu Timur Kecamatan Pasimasunggu Timur

Yaitu dengan pemberian Tugas Pembantuan pada pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan

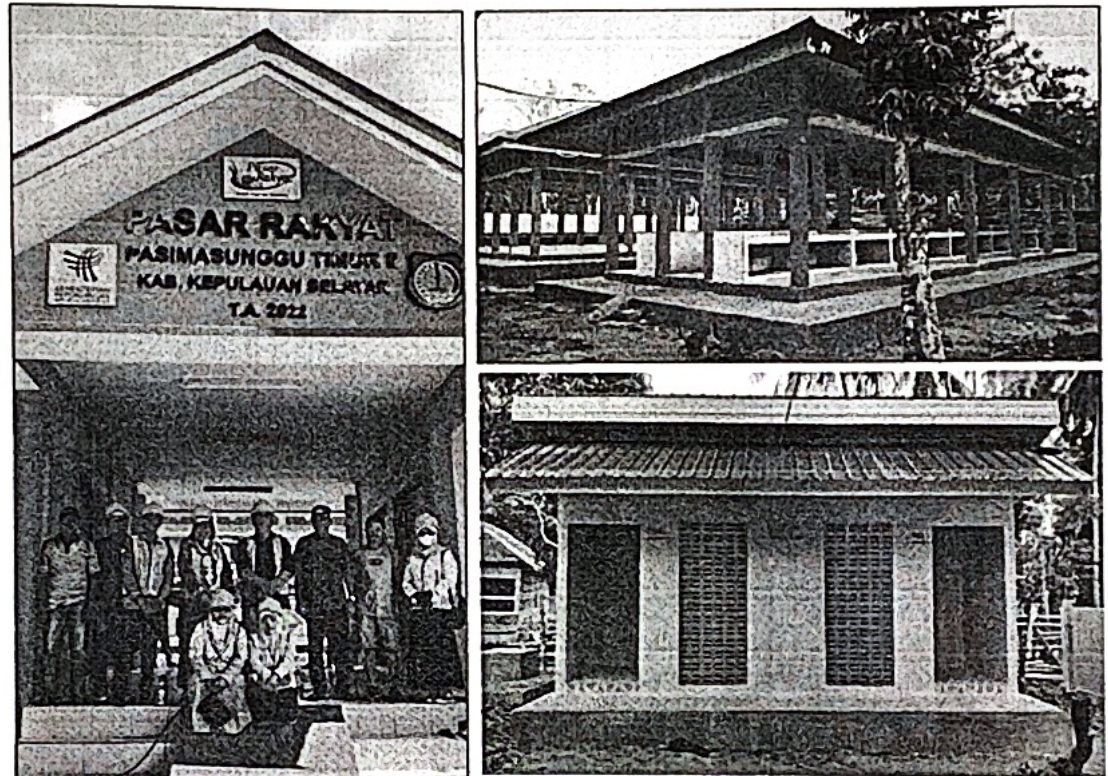
Berikut dibawah ini, gambar lokasi pasar rakyat yang sudah selesai dibangun :

✓ Pasar Rakyat Pasimarannu di Kecamatan Pasimarannu





- ✓ Pasar Rakyat pasimasunggu Timur di Kecamatan Pasimasunggu Timur



3.4. Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan Penugasan

Permasalahan tidak ada sehingga kegiatan berjalan dengan baik dan tepat waktu.

3.5. Saran dan Tindak Lanjut

Agar pelaksanaan kegiatan yang akan datang dapat berjalan lebih baik dari segi waktu, realisasi dan capaian kinerja yang akuntabel. diharapkan masukan-masukan yang positif bagi perbaikan dimasa yang akan datang semoga keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugas secara sungguh - sungguh dan penuh tanggung jawab dapat dicapai.



BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 Unit Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, semoga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kinerja instansi di masa datang.

Semoga keinginan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugas secara sungguh - sungguh dan penuh tanggung jawab dapat dicapai.

